

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

C.J.N. 1984, Verstenden, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*.

Deny Juanda Puradimaja, 2004, *Hidrogeologi*, Bandung, Institut Teknologi Bandung.

Harun, 2012, *Kontruksi Perizinan Usaha Industri Prospektif*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

H. Darwis, 2018, *Pengelolaan Air Tanah*, Yogyakarta, Pena Indis.

Mukti FajarND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nort, 1990, dalam Lembaga Administrasi Negara, *Standar Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama.

Peter Muhammad Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Philipus M. Hadjon et. Al., 1998, *Pengantar Hukum Administrasi indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika.

Ridwan H. R., 2006, *Hukum Administrasi Negara Cet. 6*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Robert J. Kododatie, 2012, *Tatat Ruang Air Tanah*, Yogyakarta, Andi Publisher.

Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan 8, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Sitanala Arsyad dan Ernan Rustiadi, 2012, *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*, Jakarta, Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suyono Spsrodarsono, 1980, *Hidrologi untuk Pengairan*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- S.F Marbun & M. Mahfud. MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Totok Sutrisno, 2002, *Teknologi Penyediaan Air Bersih*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta, Grasindo.

Jurnal

- Andy Kristafi Arifianto, “Analisis Pengembangan Air Bawah Tanah Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, *Jurnal Reka Buana*, Volume 2, Nomor 1, (September 2016-Februari 2017).
- Bouweer Herman, “*Artificial Recharge of Groundwater: Hydrogeology and Engineering*”, *Hydrogeology Journal*, Volume 10, Nomor 1, (2002).
- Endah Puji Lestari dan Maryanto, “Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Pengusahaan Air Bawah Tanah di Ditreskrimsus Polda Jateng”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 1 (Maret 2017).
- Evy Umilasari, 2014, “Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 16, Nomor 1, ISSN: 1979-5645.
- Frenadin Adegustara, Yuslim Syofiarti, Leri Patra, “Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Rangka Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Pasca Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 24, Nomor 2, Tahun 2016 (Juli-Desember).

Meyra Riastika, “Pengelolaan Air Tanah Yang Berbasis Konservasi Di Recharge Area Boyolali”, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Volume 9, Nomor 2, (2012).

Prieska Sasmita, Haris Retno Susmoyati dan Poppilea Erwinta, “Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Penggunaan Air Tanah di Kota Samarinda” *Jurnal Beraja Niti*, Volume 3, Nomor 2, (Maret 2014).

Retno Woro Kristiany, Untung Sri Hardjanto, Eko Sabar Prihatin, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, (Tahun 2016).

Upik Hamidah, “Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar Lampung”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3, Nomor 2, (Desember 2015).

Wawan Setiawan, Abubakar Iskandar, Ginung Pratidina, “Peranan Pembinaan dan Pengawasan Pada Pengusahaan Air Tanah di UPT Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Wilayah Pelayanan I Cianjur”, *Jurnal Governansi*, Volume 4, Nomor 1, (April 2018).

Disertasi

Marcus Lukman, 1996, “Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional” (Disertasi, Bandung, Universitas Padjadjaran)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Peraturan Daerah Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Internet

Badan Geologi Kementerian ESDM, “Sistem Informasi Air Tanah”, 2017, www.pag.bgl.esdm.go.id/siat/, diakses pada hari Minggu 27 Mei 2018 pukul 10.00 WIB.

Damang, 2014, “Pengertian perizinan”
, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>,
Diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 13.20 WIB.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Rusnoviandi), 2017, “Izin Pengusahaan Air Tanah”, “www.sumbarprov.go.id/details/news/10225”, diakses pada hari Minggu, 27 Mei 2018, pukul 9.14 WIB.

Irwan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*,
<http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html?m=> ,
diakses pada 29 Oktober 2018 pukul 20.10 WIB